UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590 +62 813 6511 8590 <https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4>

Diterima: 03/07/2021, Diperbaiki: 16/07/2021, Diterbitkan: 20/07/2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE (PEER TO PEER LENDING) DI PLATFORM TANIFUND

Asty Thania Dayanty¹, Chrisnoven Pasaribu², Yeni Syahfitri Sigalingging³, Alvines⁴,
Ronald Hasudungan Sianturi⁵

1) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: aarkanamalik@gmail.com

2) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: marbentuapasaribu@gmail.com

3) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: yenisigalingging@gmail.com

4) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: alvinesvines6452@gmail.com

5) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: hasudungan_r@yahoo.com

Corresponding Author: Asty Thania Dayanty

ABSTRACT

Through P2P Lending, we can invest. The purpose of this research is to analyze the parties responsible for the Loan Facility Distribution Agreement on the TaniFund Platform, along with legal protection for investors. In this research, we used juridical-normative and descriptive research. The results of this study are based on the agreement on the TaniFund platform, the lender is categorized as a lender where the organizer is not responsible for the risk of borrowing and interest losses due to default of the loan recipient. Legal protection for investors is stated in article 14 Law Number 25 of 2007 concerning Investment. Based on agreements on the TaniFund platform, lenders can conduct deliberations or sue to the general court in the event of a dispute with the organizer. Researchers hope that the government can be more optimal in supervising P2P Lending platforms in Indonesia, so that organizers do not arbitrarily include the transfer of responsibility in making standard agreements that can harm investors.

Keywords: Legal Protections, Investor, Peer To Peer Lending, TaniFund Platform

ABSTRAK

Melalui *PeerToPeer Lending*, kita dapat berinvestasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pihak yang bertanggung jawab dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di Platform TaniFund, beserta perlindungan hukum bagi investor. Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ialah berdasarkan perjanjian di Platform TaniFund pemberi dana dikategorikan sebagai pemberi pinjaman yang dimana pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab atas resiko pinjam meminjam maupun kerugian bunga akibat wanprestasi penerima pinjaman. Perlindungan hukum terhadap investor tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Undang-Undang Pasar Modal. Berdasarkan perjanjian di Platform TaniFund, pemberi pinjaman dapat melakukan musyawarah ataupun menuntut ke pengadilan umum jika terjadi perselisihan dengan penyelenggara. Peneliti berharap pemerintah dapat lebih optimal dalam mengawasi platform-platform *P2PLending* di Indonesia, agar penyelenggara tidak semena-mena mencantumkan pengalihan tanggung jawab dalam membuat perjanjian baku yang dapat merugikan investor.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, *Peer To Peer Lending*, Platform TaniFund

PENDAHULUAN

Setiap manusia harus berhadapan dengan berbagai pilihan dalam memilih sumber daya yang mereka punyai saat ini dan yang akan datang. Investasi ialah sebuah komitmen untuk memasukkan sejumlah dana saat ini dan bertujuan untuk mendapat benefit atau untung di masa yang akan datang.¹ Saat ini penggunaan internet dan bisnis dari internet telah berkembang pesat, hingga sektor hukum juga dimintai untuk campur dan turun tangan dalam bisnis melalui internet agar bisa digapai ketertiban dan kepastian dalam melakukan kegiatan bisnis, di samping tergapai pula keadilan bagi masing-masing pihak untuk berbisnis. Berbisnis melalui internet disebut dengan *electronic Commerce (E-Commerce)*. *E-commerce* adalah sebuah proses dalam melakukan kegiatan bisnis memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara konsumen, perusahaan, juga masyarakat yang berbentuk transaksi elektronik, pertukaran barang, servis, dan informasi dengan cara elektronik.²

Layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah pengelolaan layanan jasa keuangan untuk menjumpakan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam membuat perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah secara langsung dari sistem elektronik dengan memakai jaringan internet.³ *Peer to peer lending* ialah pertemuan antara kreditur dengan debitur via internet. *Fintech P2PLending* menciptakan sebuah platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan pengembalian uang lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan

¹ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal 1.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 407.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3.

proses yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Investasi di P2P *lending* ini menjanjikan pengembalian yang lumayan tinggi pertahunnya, namun dalam kegiatan investasi harus sesuai dengan profil serta *risk appetite* kita dan kemampuan dalam mengelolanya. Jadi, langkah awal dalam proses investasi di P2P *lending* adalah memahami risikonya. Kita harus berinvestasi dana dengan menelaah tingkat dan jenis risiko yang akan terjadi.⁴

Di Indonesia, telah diatur dasar hukum tentang pinjam meminjam yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan dalam pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.⁵ Kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga berperan membuat peraturan tentang pinjam-meminjam via online ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

TaniFund adalah platform *peer to peer (P2P) lending* yang memfokuskan bidangnya melalui industri agrikultur di Indonesia.⁶ Dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman di platform tersebut, kami menemukan beberapa risiko terhadap para pihak yang terlibat. Beberapa pasal dalam perjanjian tersebut terkesan membebaskan risiko maupun kerugian kepada pihak pemberi dana dan terkesan tidak memberi kepastian maupun perlindungan hukum dalam pertanggungjawaban jika ada pihak yang mengalami risiko gagal bayar maupun kerugian. Sehingga kami sebagai penulis sangat tertarik untuk meneliti penelitian ini yang judulnya adalah “Perlindungan Hukum terhadap *Investor* dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online di Platform *TaniFund*”.

Rumusan Masalah

1. Berdasarkan perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman di platform *TaniFund*, apakah pemberi dana dikategorikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) atau sebagai pemodal?
2. Jika selama masa perjanjian bunga tidak dibayarkan, pihak manakah yang akan bertanggung jawab?
3. Jika proyek dalam perjanjian telah selesai namun jumlah investasi pokok tidak dibayarkan, maka pihak manakah yang akan bertanggung jawab?

⁴ Minisite OJK, “Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan”, <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>> (diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.40 WIB)

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1765.

⁶ TaniFund, “Tanamkan modal, nikmati hasil panennya bersama petani”, <https://tanifund.com/?utm_campaign=12356042293&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=499249756792&utm_term=&adgroupid=118649928460&gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkQTIfLgrD-MUTLZh178vhS4Sg1c3mODRBAX5dhCAqTtgPwBaQVv1g8aAqnwEALw_wcB>, (diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 11.28 WIB).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak pemberi dan dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman di *platform TaniFund*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang bertanggung jawab jika selama masa perjanjian bunga tidak dibayarkan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang bertanggung jawab jika proyek dalam perjanjian telah selesai namun jumlah investasi pokok tidak dibayarkan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian yuridis normatif. Yang ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*).⁷ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian atas aturan-aturan perundangan, yang bisa ditelaah dari sudut hirarki perundang-undangan (vertical) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah keberadaan kebenaran hukum seperti apa adanya.⁹

Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder antara lain: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan hukum yang isinya membahas bahan primer. Bahan Hukum Tersier ialah bahan-bahan yang mendukung bahan primer dan sekunder.¹⁰

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan pengumpulan data berupa bahan hukum yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa (studi kepustakaan).¹¹

Di penelitian ini kami mengkaji, mempelajari, dan menelaah sebuah perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman di *platform TaniFund* dan bermacam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Analisis Data

Pengolahan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa pemikiran, makna, cara penulis memandang beragam gejala yang menjadi fokus penelitian. Makna yang

⁷ Elizabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 71.

⁸ *Ibid*, hal. 83

⁹ *Ibid*, hal. 69

¹⁰ *Ibid*, hal. 104

¹¹ Nurhaini, *Op.cit*, hal. 141-142

ingin di dapatkandan ditelaah dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, begitupun beragam pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kreditur dan Investor (Pemodal)

Kredit ialah persediaan uang ataupun tagihan, berdasarkan kesepakatan dalam pinjam meminjam antara bank bersama pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk dapat melunasi utang-utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹³ Definisi pinjam-meminjam yaitu:

“Suatu kontrak dimana pihak satu memberi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis sebab pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang samapula (pasal 1754 KUHPerdara)¹⁴”.

Jadi yang membedakan antara kredit dan pinjam meminjam adalah tentang pemberian bunga. Dalam perjanjian kredit harus mencantumkan bunga di dalamnya sedangkan perjanjian pinjam meminjam tidak mengharuskan pinjaman uang disertai dengan bunga. Pemberian kredit dapat diartikan sebagai pemberian pinjaman sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu dan disertai bunga.

Dalam hal ini orang yang meminjamkan uang dengan suatu jumlah tertentu kepada peminjam uang disebut kreditur. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, kreditur merupakan orang yang memiliki piutang yang disebabkan oleh perjanjian ataupun Undang-Undang yang bisa ditagih di muka pengadilan. Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur sparatis serta kreditur preferen yang tertuang di KUHPerdara yakni :

1. Kreditur Konkuren

Di dalam pasal 1132 KUHPerdara terdapat pengertian kreditur konkuren, yaitu kreditur dengan hak *Pai Passau* dan *Pro Rata* artinya adalah para kreditur secara bersama-sama untuk mendapatkan pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) dan dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan, terhadap keseluruhan harta kekayaan debitur.

2. Kreditur Preferen (Yang di Istimewakan)

Pengertian kreditur ini adalah kreditur yang oleh sematamata karena sifat piutang mendapat pelunasan dahulu dan memiliki hak istimewa yaitu suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seseorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang piutang di istimewa yang tertulis dalam pasal 1139 KUHPerdara.

¹² Ashofa, *Op.cit*, hal.57

¹³ Soedjono Dirjdosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal. 5

¹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 125.

3. Kreditur Separatis

Kreditur separatis ialah kreditur yang memegang suatu hak jaminan (*secured creditor*) dan harus mendapatkan pengembalian uang terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur preferen yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa ataupun hak untuk didahulukan (*preferred creditor*), terkecuali Undang-Undang yang menentukan lain.¹⁵

Penanaman modal atau investasi ialah pelaksanaan perekonomian nasional yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan dalam negeri maupun luar negeri.¹⁶ Pengertian dari investasi artinya kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*), yang bertujuan meningkatkan serta mempertahankan nilai modal, yang bisa berupa uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, dan juga keahlian yang akan mendapatkan hasil / keuntungan.¹⁷ Penanaman Modal merupakan kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁸ Modal adalah keseluruhan persediaan (*stock*) kapasitas produktif yang bisa dimanfaatkan oleh suatu negara ataupun rumah-rumah tangga di dalamnya. Sedangkan pengertian modal menurut UU No.25 Tahun 2007 adalah aset yang berbentuk uang ataupun bentuk lainnya yang bukan uang dan dimiliki oleh Penanam Modal yang memiliki nilai yang ekonomis.¹⁹

Berdasarkan pengertian ada perbedaan mendasar antara kreditur dan investor. Dalam bisnis, investor ialah pihak baik perorangan atau lembaga yang berasal dari dalam atau luar negeri yang melakukan kegiatan investasi yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sementara itu Penanam Modal atau biasa disebut investor menurut Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri juga Penanam Modal Asing.

Apabila dilihat dari definisi kreditur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang, maka si pemberi pinjaman di dalam platform *TaniFund* dikategorikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) yang memiliki piutang karena perjanjian yang pelunasannya disertakan bunga. Dan di pasal 1132 KUH Perdata juga tertulis bahwa kreditur konkuren adalah kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan hutang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan sesuai dengan penjelasan yang tertera di dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman di pasal 1 huruf (H) yang berbunyi:

“Pemberi pinjaman adalah pemberi pinjaman yang mempunyai piutang karena Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Platform *TaniFund*”

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenada Media, Jakarta 2018, hal. 14-15.

¹⁶ Daniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Indonesia Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 9

¹⁷ *Ibid*, hal. 19

¹⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1)

¹⁹ Harjono, *Op.Cit* hal. 142-143

Pihak-pihak Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di *Platform TaniFund*

Di dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman, parapihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara adalah perusahaan yang bergerak sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 77/2016 yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan Surat Tanda Daftar Nomor S-278/NB.213/2018 tanggal 20 April 2018.
2. Pemberi Pinjaman adalah orang perorangan yang bermaksud untuk menempatkan dan menyalurkan dananya untuk dipinjamkan secara langsung kepada penerima pinjaman melalui *Platform TaniFund*
3. Penerima Pinjaman dengan ini bermaksud untuk bekerjasama dengan Penyelenggara yang bertindak selaku pengatur transaksi penyaluran fasilitas pinjaman untuk memberi pinjaman kepada Penerima Pinjaman via *Platform TaniFund* dan Penyelenggara telah menyetujui maksud Pemberi Pinjaman tersebut.

Dalam pasal 1 huruf (i) disebutkan bahwa Penerima Pinjaman ialah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki utang sebab Perjanjian Meminjam melalui Platform TaniFund untuk mendanai proyek suatu budidaya di bidang pertanian.

Di pasal 5.3 dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman, disebutkan bahwa Pembayaran atau pelunasan fasilitas pinjaman yang diterima oleh kreditur terdiri atas:

- 1) Pokok fasilitas pinjaman;
- 2) Bunga;
- 3) Denda (apabila ada); dan
- 4) Biaya-biaya lain (apabila ada).

Namun, menurut isi perjanjian di pasal 9.1 huruf e menyatakan “Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas seluruh resiko pinjam-meminjam, ganti kerugian, biaya, denda /bunga akibat wanprestasi penerima pinjaman termasuk resiko gagal bayar, sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam dimana hal tersebut di tanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman.” Dan ditegaskan lagi di pasal 9.2 huruf (a) yang menyatakan “Pemberi pinjaman memahami dan menyadari dan menanggung keseluruhan resiko pinjam meminjam termasuk bunga akibat dari wanprestasi penerima pinjaman termasuk pada resiko gagal bayar, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang mana ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman.

Dengan kata lain pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab atas resiko pinjam meminjam maupun kerugian denda dan bunga akibat dari wanprestasi penerima pinjaman dikarenakan penyelenggara hanya penghubung antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui *Platform Tanifund*. Dan pemberi pinjaman juga telah mengetahui bahwa segala kerugian ataupun resiko yang terjadi dalam perjanjian maka pemberi pinjaman menanggung resiko sendiri tanpa melibatkan penyelenggara karena posisi penyelenggara hanya penghubung melalui *Platform Tanifund*.

Berdasarkan perjanjian, yang bertanggung jawab atas jumlah investasi pokok yang tidak dibayarkan adalah penyelenggara. Dalam hal ini penyelenggara yang terlebih dahulu harus

mendapatkan kuasa dari pemberi pinjaman untuk melakukan penagihan, menerima pembayaran dan lain lain, yang terkait yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban penerima pinjaman atas pinjamannya. Di pasal 6.2 yang berbunyi:

“Pemberi Pinjaman wajib membuat dan menandatangani secara terpisah surat kuasa, penunjukan, pemberian wewenang dan setiap dokumen-dokumen lainnya untuk memberlakukan kuasa, penunjukan dan/atau pemberian wewenang yang diberikan kepada Penyelenggara.”

Jadi, dengan surat kuasa tersebut penyelenggara dapat melakukan upaya penagihan terhadap penerima pinjaman agar segera melakukan pembayaran pinjaman pokok yang dipinjam. Ketentuan ini berdasarkan pasal 6.1 huruf e yaitu:

“Pemberi Pinjaman dengan ini menunjuk dan mengangkat Penyelenggara, secara tidak dapat ditarik kembali, sebagai penerima kuasa yang benar dan sah dengan kuasa penuh untuk melakukan penagihan terhadap Penerima Pinjaman atas pelunasan fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam yang disertai dengan hak substitusi untuk menunjuk atau mengalihkan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan upaya penagihan.”

Namun peneliti menemukan keganjalan yang mengakibatkan kerugian kepada pemberi pinjaman dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di *Platform TaniFund* tersebut. Seperti disebutkan dalam pasal 6.1 huruf e: Penyelenggara akan melakukan upaya penagihan kepada penerima pinjaman, tetapi di pasal 9.1 huruf e menyebutkan penyelenggara tidak bertanggung jawab atas seluruh resiko pinjam meminjam, ganti rugi termasuk bunga akibat dari atau wanprestasi penerima pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada resiko gagal bayar. Yang berarti penyelenggara hanya bertanggung jawab dalam hal upaya penagihan pinjaman dan bilamana penerima pinjaman tetap tidak mampu melakukan pembayaran atas pinjamannya, maka penyelenggara tidak bertanggung jawab atas hal tersebut dan resiko gagal bayar yang dialami penerima pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36 ayat(1) yang menjelaskan bahwasanya Penyelenggara wajib menyusun Perjanjian baku berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu ayat(2) menjelaskan bahwasanya “Perjanjian baku sebagaimana pada ayat(1) Penyelenggara dilarang: mencantumkan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna.”²⁰

Dalam hal ini perjanjian baku ialah perjanjian yang dibuat dengan cara sepihak oleh penyelenggara yang dipahami dan disetujui oleh penerima pinjaman.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor

Perusahaan dan lembaga finansial membantu rumah tangga dan perusahaan untuk menabung, memudahkan mekanisme pembayaran yang kompleks di berbagai element

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 36 ayat(1) dan(2)

perekonomian. Oleh karenanya, acapkali menjadi sorotan bahwasanya gagalnya lembaga finansial dapat begitu mengganggu kegiatan ekonomi di Indonesia.²¹

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi Investor, maka pemerintah telah mengatur Hak Penanam Modal yang tertuang di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menetapkan bahwasanya Penanam Modal berhak untuk mendapat:

- Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan;
- Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- Hak pelayanan
- Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Undang-Undang di atas merupakan jaminan kepastian hukum untuk berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta perlindungan bagi para Investor di Indonesia. Namun di Indonesia belum mempunyai pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk investor yang melakukan investasi secara online, tetapi di Undang-Undang Pasar Modal terdapat sanksi hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, berupa sanksi Administratif, Pidana dan Perdata.²³ Secara perdata, tercantum di pasal 111 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi: “Setiap Pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat pelanggaran atas UU in dan peraturan pelaksanaan nyabisa menuntut ganti rugi, baik sendiri ataupun bersama dengan Pihak lain yang mempunyai tuntutan yang serupa, terhadap Pihak/ Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Di dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di Platform TaniFund, tertera jika terjadi perselisihan diantara para pihak mengenai dengan perjanjian maka akan diselesaikan secara musyawarah yang tertulis di dalam pasal 15.2 yang berbunyi:

“Jika terjadi perselisihan antara masing-masing pihak dengan Perjanjian ini juga hal yang diatur dalam yang berhubungan dengan perjanjian ini dan/atau pelaksanaan dari dan/atau penafsiran atas perjanjian ini, masing-masing Pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah”.

Dan apabila secara musyawarah perselisihan atau sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan maka dalam pasal 15.3 pasal 15.4 tertulis bahwa satu pihak atau para pihak secara bersama-sama dapat mengajukan penyelesaian atau sengketa tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Penyelenggara akan mengusahakan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah. Di pasal 15.5 juga mengatakan apabila perselisihan atau sengketa yang dimaksud dalam pasal 15.4 tidak terselesaikan dengan musyawarah dalam jangka waktu 30 hari, konflik yang berasal dari atau sehubungan dengan perjanjian pinjaman meminjam

²¹ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga Lembaga Finansial*, PT. Bumi Akasara, Jakarta, 2006, hal. 108.

²² Harjono, *Op.cit*, hal. 135.

²³ Eddy Martino Putralie, et.al, “Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, Mercatoria”, Vol. 4, No. 1, hal. 20, 2011.

dapat dirampungkan di lembaga peradilan umum yang domisili hukumnya di tentukan sesuai kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman.

Dalam hal Penyelenggara (PT. TaniFund) berhenti beroperasi disebutkan di pasal 16.3 Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman bahwa “Terhadap dana dari Penerima Pinjaman sebagai repayment Penerima Pinjaman atas pokok fasilitas pinjaman dan bunga namun belum diteruskan kepada Pemberi Pinjaman, Penyelenggara akan segera melakukan pengembalian pokok fasilitas pinjaman dan bunga yang menjadi hak masing-masing Pemberi Pinjaman terkait.” Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya penyelenggara tetap harus bertanggung jawab atas pokok dan bunga yang menjadi hak pemberi pinjaman jika PT. TaniFund berhenti beroperasi, penyelenggara tetap berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok investasi dan bunga. Apabila Penyelenggara tidak melakukan pengembalian pokok dan bunga kepada pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman dapat melakukan upaya hukum berdasarkan pasal 16.3 dalam perjanjian tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di Platform TaniFund, pemberi dana dapat dikategorikan sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dikarenakan pengembalian terhadap dana yang diberikan atau ditanamkan di platform TaniFund berupa jumlah investasi pokok disertai dengan bunga. Dan apabila jumlah investasi pokok dalam perjanjian tersebut tidak dibayarkan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara. Begitu pun dengan bunga yang tidak dibayarkan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dengan ketentuan yang memberi pinjaman harus membuat surat kuasa yang terpisah terlebih dahulu untuk kemudian penyelenggara dapat menagih pokok dan bunga tersebut kepada penerima pinjaman. Tetapi ketentuan tersebut hanya berlaku dalam hal penyelenggara berhenti beroperasi berdasarkan Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di Platform TaniFund pasal 16.

Apabila penerima pinjaman tidak membayar utangnya (jumlah investasi pokok dan bunga) dengan kata lain penerima pinjaman gagal bayar, maka penyelenggara tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, pemberi pinjaman harus menelan pil pahit yaitu menerima dan menanggung segala resiko kerugian atas wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh penerima pinjaman, termasuk gagal bayar. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9.1 Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di Platform TaniFund.

Terkait perjanjian pinjam meminjam secara online belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut tetapi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal bisa menjadi landasan perlindungan hukum khususnya untuk investor atau penanam modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pihak penyelenggara apabila melakukan pelanggaran hukum atau investor mengalami kerugian, antara lain sanksi administratif pidana dan perdata. Secara perdata pihak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi.

Saran

Pemerintah seharusnya dapat lebih optimal dalam mengawasi *platform-platform Peer To Peer Lending* yang ada di Indonesia, agar penyelenggara tidak semena-mena mencantumkan isi perjanjian mengenai pengalihan tanggung jawab dalam membuat perjanjian baku yang dapat merugikan investor.

Investor sebaiknya membaca dengan lebih teliti isi perjanjian baku yang diberikan perusahaan/pihak penyelenggara sebelum disepakati. Agar investor mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama resiko dan kerugian yang dapat dialami pihak investor dalam kontrak/perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, C., (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan : Yani Corporation.
- Ashofa, B., (2007). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Darmawi, H., (2006). *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Dirjdosisworo, S., (2003). *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Fuady, M., (2016), *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- K. Harjono, D., (2007). *Hukum Penanaman Modal Indonesia Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Nurhaini, E., (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Sjahdeini, S.R., (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta : Prenada Media.
- Sinamo, N., (2010). *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta : Jala Permata Aksara,.
- Subekti, (1995) *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Tandelin, (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : PT.Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman No. T210326127389 di Platform TaniFund

Martino, E., et.all, (2011). *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*, Mercatoria, Vol.4, No.1.

Diakses dari: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>.

Diakses dari:

https://tanifund.com/?utm_campaign=12356042293&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=499249756792&utm_term=&adgroupid=118649928460&gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkQTlfLgrD-MUTLZhl78vhS4Sg1c3mODRBAX5dhCAqTtgPwBaQVv1g8aAqnwEALw_wcB.